

## **KATA PENGANTAR**

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan mewujudkan masyarakat Jambi yang maju dan sejahtera, sebagaimana yang termuat dalam Visi Jambi 2021-2026, yaitu "JAMBI MANTAP" yang berarti "JAMBI LEBIH MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT". Untuk itu maka pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu : ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dengan memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, diharapkan pembangunan akan meningkatkan nilai dan fungsi dari lingkungan itu sendiri dan bukan sebaliknya.

Implementasi pembangunan berkelanjutan menyangkut spektrum yang luas dan mengandung pengertian yang komprehensif, menuntut keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat. Disamping itu, dalam proses perencanaan diperlukan data dan informasi untuk ,menilai dan menentukan prioritas masalah dan memberikan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka pendek disusun dengan memperhatikan dan mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023. Adapun fungsi Renja bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah untuk memberikan panduan bagi perencanaan pembangunan secara komprehensif sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisiensi melalui program kegiatan yang terukur.

Di akhir kata semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Jambi, Januari 2023

KEPALA BADAN,

**H. Mukti, SE, ME**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701112 199903 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	5
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	11
3.1 Tujuan dan Sasaran .....	11
3.2 Strategi dan Kebijakan .....	13
3.3 Program/Kegiatan dan Sasaran yang ingin dicapai .....	15
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 .....	17
BAB V    PENUTUP .....	31
LAMPIRAN    Realisasi Anggaran Tahun 2022 by SIMDA	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) OPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun, Pedoman Renja Tahun 2023 ini di atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah. Sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) Tahun. Renja OPD berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis selama lima Tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tercantum visi dan misi Pemerintah Jambi menuju Jambi MANTAP. Untuk pencapaian target dari kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ( Rancangan Renja ) yang merupakan langkah awal OPD untuk mendesain Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra ) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ).

Dalam Rencana Kerja, yang tertuang dalam pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu.
2. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD
4. Dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 ini disusun dengan mempedomani :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Renja Pembangunan Daerah tahun 2014.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017.
9. Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
12. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Memuat penjelasan latar belakang, landasan hukum dan sistematika penulisan.
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**  
Memuat evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan capaian renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik tahun berjalan, hasil evaluasi mengacu pada hasil laporan kinerja.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**  
Mengemukakan rencana program dan kegiatan tujuan, kelompok sasaran dan usulan program dan kegiatan pada Tahun 2023.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
Menjelaskan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.
- BAB IV : PENUTUP**  
Memuat kata penutup atas rencana kerja perangkat daerah Tahun 2023.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk memberikan, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, gambaran umum program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja meningkatnya predikat SAKIP dalam pelaksanaan pelayanan dan jasa penunjang lainnya yang mempunyai 7 kegiatan.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan 1 kegiatan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan rincian 1 kegiatan.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan rincian 1 kegiatan.
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan rincian 1 kegiatan.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial indikator kinerja persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan rincian 1 kegiatan.

Dalam pelaksanaan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 yang dialokasikan sebesar Rp.19.581.188.125,- terealisasi sebesar Rp.19.211.662.651,- atau 98,11 %, dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.210.060	244.678.437	97,40
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.768.276.223	7.434819.389	95,71
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.656.000	17.656.000	100
	4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	628.444.299	624.202.870	99,33
	5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.214.073	123.211.500	100
	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	174.578.830	174.103.680	99,73
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.914.000	571.420.008	99,39
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	713.357.160	709.951.092	99,52
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.782.737.400	5.781.117.768	99,97

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI		
			(Rp)	%	
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	921.000.000	918.357.532	99,71
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	636.000.080	632.997.914	99,53
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.989.800.000	1.979.146.461	99,46

Dan penjabaran sasaran yang ditetapkan dalam 6 (enam) program yang diuraikan dalam 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat dalam bidang Administrasi Perkantoran dan layanan lainnya.*

Dalam upaya mencapai tujuan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat sehingga dapat dilayani dan difasilitasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

<b>PROGRAM 1</b>	<b>SASARAN</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Tersusunnya program kegiatan dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
	2. Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
	3. Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor.
	4. Terpenuhinya komponen listrik kantor.
	5. Terselenggaranya rapat-rapat.
	6. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.
	7. Terakomodirnya bahan bacaan media cetak.
	8. Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik di lingkungan kantor.
	9. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.
	10. Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2.

## **2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

*Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI sehingga dapat memiliki Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang kuat. Untuk mencapai tujuan diatas, maka disusun program dan sasaran sebagai berikut :*

<b>PROGRAM 2</b>	<b>SASARAN</b>
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terwujudnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

## **3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.**

*Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.*

Supaya tujuan ini dapat tercapai, maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

<b>PROGRAM 3</b>	<b>SASARAN</b>
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terlaksananya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

#### **4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat**

*Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat.*

Guna mencapai tujuan dimaksud, maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

<b>PROGRAM 4</b>	<b>SASARAN</b>
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat.

## 5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

*Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya*

<b>PROGRAM 5</b>	<b>SASARAN</b>
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi KUB dan penghayat kepercayaan

## 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

*Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial*

<b>PROGRAM 6</b>	<b>SASARAN</b>
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing/TKA/ Lembaga asing serta penanganan konflik di daerah.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran.

**Tujuan** merupakan penjabaran/implementasi dari misi Gubernur Jambi yang terpilih. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu sampai dengan lima tahunan.

Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2024 melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung oleh rakyat (Rapat Pleno KPU Provinsi Jambi) pada tanggal 3 Juni 2021. Dimana Al Haris-Abdullah Sani meraih suara terbanyak dan dilantik pada tanggal 12 Juli Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia.

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2021 – 2026 adalah :

“TERWUJUDNYA JAMBI LEBIH MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT, (JAMBI MANTAP)”

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026 antara lain:

MISI PERTAMA : **Memantapkan Tata Kelola Pemerintah**

Yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

MISI KEDUA : **Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah**

Yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber

daya alam dan komoditas unggulan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan local untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

**MISI KETIGA : Memantapkan Kualitas SDM**

Yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Ketigamisi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Jambi yang Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi Ketiga** Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

**“Memantapkan Kualitas SDM”**

Dari misi ketiga tersebut, sasaran yang ingin di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah Melalui Kerukunan Antar Suku dan Antar Umat Beragama. Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu:

**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Serta di Dukung oleh Program-program yang lain.**

Dalam rangka pengembangan misi guna mencapai visi yang telah dikemukakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026, yaitu :

” Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang dinamis ”

Untuk mendukung tujuan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026, yaitu :

1. Terwujudnya Situasi Politik Daerah Yang Kondusif.
2. Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis.

### **3.2 Strategi dan Kebijakan.**

***Kebijakan*** pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang serta dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2021-2026 Menuju Jambi MANTAP. Pada tabel dibawah disajikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi**

<b>Visi : Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridha Allah SWT.</b>			
<b>Misi 3 : Memantapkan kualitas SDM</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang dinamis	Terwujudnya demokrasi yang dinamis	Mengembangkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan.	Revitalisasi FKUB sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh Agama, Masyarakat dan pemerintah.

Pada tabel diatas, telah tergambar dengan jelas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang tertuang dalam visi dan misi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menjabarkan dalam 3 (tiga) misi dimana masing- masing misi dijelaskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Misi 3 : yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam kerukunan intra dan antar umat beragama, Indeks Aspek Kebebasan Sipil serta penguatan rencana aksi gangguan keamanan dalam Provinsi Jambi.

### **3.3 Program / Kegiatan dan Sasaran yang ingin dicapai.**

**Program** merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran dan target capaian kinerja dari instansi pemerintah yang maksimal baik kerjasama dengan masyarakat maupun Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Visi dan Misi yang diinginkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai 6 program dengan 12 kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Mempunyai 7 kegiatan terdiri dari 18 sub kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya persentase pelayanan administrasi perkantoran dan layanan lainnya.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.  
Mempunyai 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dengan sasarannya adalah Terwujudnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.  
Mempunyai 1 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Terlaksananya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.  
Mempunyai 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang memiliki sasaran yaitu terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.  
Mempunyai 1 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud,

fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi KUB dan penghayat kepercayaan.

6. Program Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Mempunyai 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan yang sarannya adalah Terwujudnya peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing/TKA/ Lembaga asing serta penanganan konflik di daerah serta forum koordinasi pimpinan daerah.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 mengacu pada Renstra OPD, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan Bangsa dan Politik, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai gambaran umum program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.1 Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
    - 1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
    - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD.
    - 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1.2 Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah.
    - 1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
    - 1.2.2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
  - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
    - 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 1.4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
  - 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - 1.4.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  - 1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - 1.6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
  - 2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
    - 2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

- 2.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
  - 2.1.3 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 3. Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
  - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
    - 3.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
    - 3.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
    - 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Program Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  - 4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
    - 4.1.1 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
    - 4.1.2 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
    - 4.1.3 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah.
5. Program Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
  - 5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
    - 5.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
    - 5.1.2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
    - 5.1.3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6. Program Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

6.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

6.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

6.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

6.1.3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

6.1.4 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

Melalui 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari setiap program dan kegiatan Tahun 2023 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi disusun secara spesifik, realistis dilengkapi dengan indikator Kinerja dan target capaian kinerja yang terukur sehingga dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan, target kinerja dan sasaran kegiatan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu Program Kegiatan.

Program yang telah ditetapkan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk mengukur input dan output perlu indikator yang jelas setiap kegiatan, karena Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capai kinerja suatu program atau kegiatan.

Kelompok Sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2023 dapat dijabarkan dalam 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan sebagaimana daftar dibawah ini :

**Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Provinsi Jambi**

**BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>31.069.407.788</b>				
<b>8,01</b>	<b>BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI</b>								
<b>8 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		Prov. Jambi						
<b>8 01 01 1.01</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
8 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Jambi	12 dokumen	90.000.000	APBD		12 dok	100.000.000
8 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Jambi	12 laporan	200.000.000	APBD		12 laporan	220.000.000
<b>8 01 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							

8 01 01 1.02 01	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Jambi	60 orang	8.000.000.000	APBD		60 orang	8.500.000.000
8 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Jambi	12 dokumen	275.000.000	APBD		12 dokumen	275.000.000
<b>8 01 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							
8 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov. Jambi	10 orang	27.500.000	APBD		10 orang	30.000.000
<b>8 01 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
8 01 01 1.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Jambi	1 paket	30.000.000	APBD		1 paket	32.000.000
8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov. Jambi	1 paket	55.000.000	APBD		1 paket	55.000.000
8 01 01 1.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Jambi	1 paket	60.000.000	APBD		1 paket	65.000.000
8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	Prov. Jambi	10 dokumen	20.400.000	APBD		10 dokumen	22.600.000
8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Jambi	4 laporan	340.000.000	APBD		4 laporan	360.000.000
<b>8 01 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov. Jambi	21 unit	210.000.000	APBD		21 unit	200.000.000
<b>8 01 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Jambi	1 laporan	20.500.000	APBD		1 laporan	22.000.000
8 01 01 1.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Jambi	4 laporan	140.000.000	APBD		4 laporan	140.000.000
8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Prov. Jambi	4 laporan	57.000.000	APBD		4 laporan	60.000.000

		Disediakan							
<b>8 01 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
8 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prov. Jambi	20 unit	300.000.000	APBD		20 unit	300.000.000
8 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov. Jambi	40 unit	87.200.000	APBD		40 unit	87.200.000
8 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Jambi	2 unit	1.100.000.000	APBD		2 unit	250.000.000
<b>8 01 02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>TERSUSUNNYA PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Prov. Jambi</b>						
<b>8 01 02 1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI</b>							
8 01 02 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Prov. Jambi	4 dokumen	100.000.000	APBD		4 dokumen	250.000.000
8 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Jambi	300 orang	320.000.000	APBD		300 orang	350.000.000
8 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Jambi	6 laporan	360.000.000	APBD		6 laporan	365.000.000

8 01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>TERSUSUNNYA PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>							
8 01 03 1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Terlaksana Kebijakan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>							
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Jambi	400 orang	250.000.000	APBD		400 orang	350.000.000
8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Jambi	85 orang	5.350.000.000	APBD		85 orang	340.000.000
8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Jambi	11 laporan	165.000.000	APBD		11 laporan	185.000.000

8 01 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>TERSUSUNNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>							
8 01 04 1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>							
8 01 04 1.01 01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	4 dokumen	250.000.000	APBD		4 dokumen	320.000.000
8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Jambi	250 orang	1.000.000.000	APBD		250 orang	1.150.000.000
8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Jambi	4 laporan	171.000.000	APBD		4 laporan	195.000.000
8 01 05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>TERSUSUNNYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>							
8 01 05 1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi KUB dan penghayat kepercayaan</b>							
8 01 05 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	4 dokumen	120.000.000	APBD		4 dokumen	150.000.000

8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Jambi	250 Orang	500.000.000	APBD		250 orang	540.000.000
8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Jambi	5 orang	70.000.000	APBD		5 orang	90.000.000
<b>8 01 06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>TERSUSUNNYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>							
<b>8 01 06 1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>							
8 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Jambi	100 orang	520.000.000	APBD		100 orang	600.000.000
8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Jambi	20 orang	250.000.000	APBD		20 orang	100.000.000

8 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Jambi	11 laporan	300.000.000	APBD		11 laporan	27.500.000
8 01 06 1.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prov. Jambi	10 dokumen	1.350.000.000	APBD		10 dokumen	1.400.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023, tersaji dalam suatu perencanaan yang tersusun secara sistematis dan menganut Asas Kepatutan sehingga dalam menyusun DPA-SKPD diharapkan mampu mencerminkan OUTPUT dan INPUT Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023.

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2023  
KEPALA BADAN,

**H. Mukti, SE, ME**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701112 199903 1 002